



LKjIP

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021



www.dkpp.ketapangkab.go.id



Dkpp Ketapang



DISKPP_KETAPANG



dkpp@ketapangkab.go.id



(0534) 32753

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 ini dapat selesai disusun tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) ini adalah salah satu wujud dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mengetahui capaian kinerja. Laporan Kinerja ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menginformasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja atas sasaran strategis melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, laporan ini juga merupakan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien dan berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun, semoga bermanfaat. Masukan dan saran guna peningkatan kinerja maupun peningkatan kualitas dalam penyusunannya sangat diharapkan.

Ketapang, Pebruari 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG



Drs. HERYANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711023 199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu **“Meningkatnya ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan:**
 - Diukur dengan indikator persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan.
 - Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh 4 (empat) Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - Target kinerja sasaran tahun 2021 untuk persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan adalah **14%** dan terealisasi sebesar **14,32% atau 102,29%**, sedangkan target untuk Skor Pola Pangan harapan (PPH) sebesar **88,0** terealisasi sebesar **80,7 atau 91,70%**. Dengan demikian capaian kinerja untuk skor PPH belum tercapai.
 - Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, untuk persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan terjadi penurunan sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan mengalami peningkatan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis ke-2 (dua) yaitu **“Meningkatnya Produksi Perikanan”:**
 - Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap termasuk didalamnya jumlah produksi perikanan dari perairan umum dibandingkan dengan target tahunan.

- Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - Target kinerja sasaran untuk indikator produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar **24.243 ton** dan terealisasi sebesar **23.365,54 ton atau 96,38%**, sedangkan target untuk produksi perikanan budidaya sebesar **20.370 ton** per tahun dan terealisasi sebesar **21.316,9 ton atau 104,65%**. Dengan demikian capaian kinerja untuk produksi perikanan budidaya mencapai target sedangkan untuk capaian kinerja untuk produksi perikanan tangkap belum tercapai.
 - Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja pada tahun 2021 untuk jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya menunjukkan peningkatan.
3. Capaian sasaran strategis ke-3 yaitu **“Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat:**
- Diukur dengan indikator **Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat** rata-rata per kapita dalam satu tahun dalam satuan kilogram.
 - Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - Target indikator sasaran untuk **Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat** tahun 2021 adalah **54,57 kg per kapita/tahun** dan terealisasi sebesar **51,50 kg per kapita/tahun atau 94,37%**. Dengan demikian capaian kinerjanya belum tercapai.
 - Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **1,40%**.

Terhadap seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang yaitu:

1. Pengembangan teknologi hasil produksi pertanian dan pemasaran hasil produksi pertanian melalui pengembangan Toko Tani Indonesia dengan subsidi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan terutama yang dikonsumsi masyarakat sesuai kewenangan kabupaten;
3. Peningkatan bantuan peralatan Perikanan yang ramah lingkungan;
4. Penyediaan bibit ikan unggul dan Peningkatan kapasitas nelayan;
5. Peningkatan pengawasan di bidang perikanan;
6. Peningkatan penganekaragaman pengolahan hasil perikanan; dan
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknis bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran strategis Tahun 2021, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.12.923.150.191,-** dari APBD Kabupaten Ketapang dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 11.372.511.839,-** atau **88,0%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Isu-Isu Strategis.....	7
1.4. Keadaan Pegawai	9
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	10
1.6. Keuangan	11
1.7. Sistematika LKjIP.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	17
2.4. Instrumen Pendukung	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
3.3. Realisasi Anggaran	51
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	52
BAB IV PENUTUP	54

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Foto Dokumentasi Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja untuk masa mendatang.

Dalam laporan kinerja ini disajikan data program dan kegiatan maupun alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu data program dan kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tertuang pada APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Namun sebelum membahas tentang capaian kinerja pada bab berikutnya terlebih dahulu digambarkan kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2021.

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas membawahi tiga sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dan
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan, dan
 - b. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
5. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Budidaya Ikan, dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.
6. Kepala UPTD Perikanan Budidaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan perikanan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui perangkat organisasinya yang terdiri dari Sekretariat Dinas dan bidang-bidang teknis yaitu:

1.2.1.1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas maka sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan dinas;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
- 3) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;

- 6) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program dan pelaporan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Dinas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada sub bagian penyusunan program, pengelolaan keuangan, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, dan evaluasi serta pelaporan dinas.

1.2.1.2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan pangan yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi ketersediaan dan distribusi pangan dan seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- 6) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan tangkap yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- 2) Perumusan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan nelayan dan seksi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan budidaya, yang terbagi dan terperinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan dan pengembangan usaha perikanan dan seksi pengelolaan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
- 7) Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, dan membawahi unit Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Unit Pelaksana

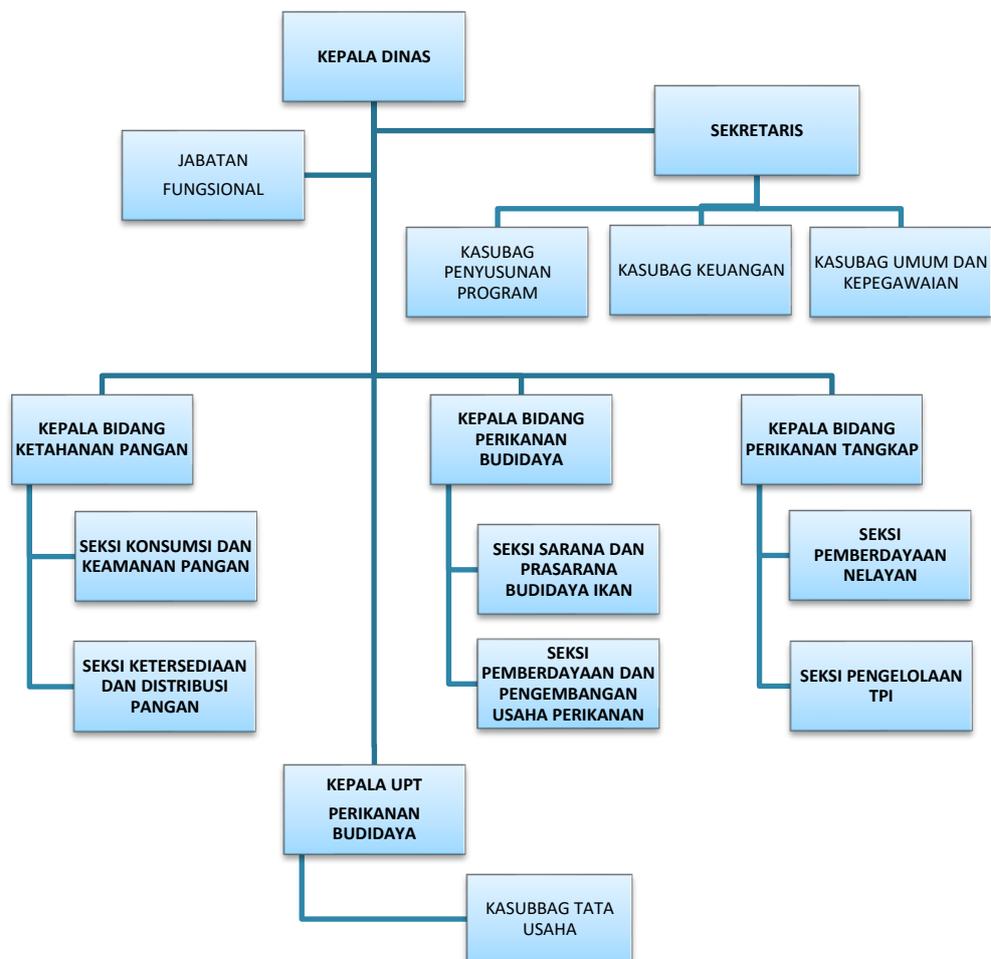
Perikanan (UPP). UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas. Dalam pelaksanaan tugas teknis, UPTD Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya; dan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

1.2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada gambar berikut ini ditampilkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1.3. Isu-Isu Strategis

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, kondisi sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya lahan produksi pangan akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tanaman perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan di Kabupaten Ketapang.
2. Masih sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah kecamatan untuk mendukung jalur distribusi pangan di Kabupaten Ketapang sehingga kondisi tersebut berdampak pada kondisi ketahanan pangan dan harga pangan.
3. Belum optimalnya upaya program diversifikasi pangan non nasi, termasuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan agar terjamin kualitasnya.
4. Adanya penurunan potensi sumberdaya Ikan akibat gangguan ekosistem air (terumbu karang dan mangrove), kelebihan tangkapan (*overfishing*), penggunaan alat tangkap terlarang (*mini trawl*), penggunaan bahan peledak dan meningkatnya kegiatan industri perkebunan dan pertambangan.
5. Penurunan produksi perikanan perairan umum karena beberapa sebab indikatif, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM nelayan, kurangnya peralatan perikanan tangkap yang memadai, belum optimalnya pengawasan di kawasan perikanan tangkap (masyarakat masih ada yang menggunakan racun ikan, setrum), dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap.

6. Belum optimalnya pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, dan terbatasnya prasarana industri pengolahan hasil ikan.
7. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang kurang memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin.
8. Sulitnya nelayan perikanan tangkap/perairan umum untuk mendapatkan BBM Solar Bersubsidi dari Pemerintah sehingga berpengaruh kepada frekuensi aktivitas penangkapan ikan di laut dan hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan tangkap sepanjang tahun.

Dari berbagai permasalahan pada sektor ketahanan pangan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi mendasari perumusan isu-isu strategis bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi dari potensi sumber daya alam yang cukup besar di sektor pangan padahal dengan luasnya lahan pertanian seharusnya dapat meningkatkan cadangan pangan daerah yang kemudian dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang.
2. Belum optimalnya kontribusi sumberdaya dari sektor perikanan cukup besar dengan potensi sumber daya lahan dan luas perairan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi wilayah perkebunan dan pertambangan sehingga akan berpengaruh pada sektor produksi pangan dan kurangnya lahan untuk perikanan budidaya.

1.4. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak hingga akhir Desember tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebanyak **102 orang** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Distribusi pegawai berdasarkan Jabatan Struktural pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II.b	1	0,98
2	Eselon III.a	1	0,98
3	Eselon III.b	3	2,94
4	Eselon IV.a	12	11,76
5	Eselon IV.b	0	0,00
6	Non Eselon/ Staf PNS	22	21,57
	Sub Total PNS	39	38,24
7	Non Eselon/ Staf Non PNS	63	61,76
	Total	102	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya 38,24%, selebihnya yaitu sebesar 61,76% berstatus sebagai tenaga Non PNS atau tenaga kontrak.

Tabel 1.2

Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
A	PNS		
1	SLTA	16	41,03
2	D-III	2	5,13
3	D-IV	2	5,13
4	S-1	12	30,77
5	S-2	7	17,95
	Sub Total	39	100,00
B	NON PNS		
1	SD	8	12,70
2	SLTP	5	7,94
3	SLTA	21	33,33
4	D-III	12	19,05
5	D-IV	1	1,59
6	S-1	16	25,40
7	S-2	0	-
	Sub Total	63	100,00
	Total	102	

Tingkat Pendidikan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan tabel tersebut di atas sebesar 51,29% masih tingkat SLTA ke bawah, demikian juga halnya tenaga Non PNS dari 63 orang proporsi Pendidikan dengan tingkat SLTA ke bawah masih sebesar 53,97%.

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	7	17,95
2	Golongan III	18	46,15
3	Golongan II	14	35,90
Total		39	100,00

Kondisi ketenagaan hingga akhir Desember 2021, belum memadai, tenaga-tenaga teknis fungsional di bidang perikanan, teknologi hasil pertanian, tenaga teknis di bidang keuangan dan teknologi informasi (IT) masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga akhir tahun 2021 masih belum memadai. Kondisi gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih tergolong kategori baik dan layak namun perlu dilakukan **rehabilitasi untuk penataan ruangan seperti ruang konsultasi, ruang menyusui, ruang rapat yang memadai, kemudian perbaikan jalan lingkungan dan halaman kantor, penataan taman kantor dan pembangunan prasarana parkir kendaraan serta pengecatan gedung rangka meningkatkan kenyamanan dan mutu pelayanan publik.**

Pemenuhan kebutuhan prasarana peralatan kerja seperti LCD Proyektor, Televisi, Notebook/PC, Printer, Kamera, Drone, Peralatan Audio, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan masih sangat diperlukan.

Berikut ini adalah kondisi gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2021.

Gambar 1.2
Kondisi Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2021



Gambaran lebih rinci terkait ketersediaan sarana prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keadaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Dinas	1 Unit	Rusak Ringan
2	Gedung UPTD Perikanan Budidaya	1 Unit	Rusak Sedang
3	Balai Benih Ikan (BBI)	2 Unit	Rusak Sedang
4	Panti Benih	1 Unit	Rusak Ringan
5	BBIP Kendawangan	1 Unit	Rusak Ringan
6	Pos UPP	12 Unit	Rusak Ringan
7	Pos Penyuluh	3 Unit	Rusak Ringan
8	Pos Kesehatan Ikan	1 Unit	Rusak Ringan
9	Kolam Ikan Percontohan	1 Buah	Rusak Ringan
10	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	4 Unit	3 Rusak Ringan, 1 Rusak Sedang
11	Kendaraan Dinas Roda 2	30 Unit	Rusak Ringan

1.6 Keuangan

Anggaran untuk belanja program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021

bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang dan DAK sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ketapang yang dirinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA).

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun anggaran 2021 sebelum perubahan adalah sebesar **Rp.11.593.596.506,-** dan setelah perubahan APBD bertambah menjadi **Rp.12.923.150.191,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 11.372.511.839,-** atau **88,0%**. Total Anggaran tersebut sudah termasuk untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai, operasional rutin kantor) termasuk untuk belanja pembayaran Honorarium pegawai Non PNS pada masing-masing bidang/unit kerja.

Alokasi anggaran yang tersedia masih belum memadai atau mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang ketahanan pangan, perikanan tangkap, perairan umum dan perikanan budidaya, serta kegiatan peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan.

1.7 Sistematika LKjIP

Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 060/0243/OR-C tertanggal 31 Januari 2022 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini diuraikan tentang Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, tugas dan fungsi, isu-isu strategis yang dihadapi, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, informasi anggaran / keuangan dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis, Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kemudian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Anggaran Tahun 2021 serta instrument pendukung lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis dan Realisasi Anggaran dalam mencapai masing-masing sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi Misi Kepala Daerah

Perencanaan kinerja dan penganggaran berbagai program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis tahun anggaran 2021 merupakan **Tahun ke-5 (lima)** dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu ***"Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera"***. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan adalah dalam rangka mewujudkan Misi yang ke-3 yaitu ***"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"***.

Merujuk pada misi tersebut di atas, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan terjaminnya ketahanan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 melalui misi ke-3 (tiga) yaitu ***"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"***, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk jangka menengah beserta indikator kinerjanya akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya cadangan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Rumah Tangga Mandiri Pangan	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan.	10%	11%	12%	13%	14%
				2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	78,8	81,1	83,4	85,7	88,0
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Meningkatnya produksi perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	17.840	18.110	18.654	19.400	20.370
				2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.498	22.845	23.301	23.767	24.243
			Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	43,43	45,65	48,75	52,88	54,57

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka ditetapkan upaya-upaya melalui penetapan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan	1. Penanganan daerah rawan pangan
		2. Meningkatnya pola konsumsi B2SA	2. Diversifikasi dan sosialisasi pangan B2SA
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	1. Peningkatan luas lahan perikanan budidaya
		2. Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan	2. Pelatihan dan sosialisasi terhadap pembudidaya ikan
		3. Penggunaan bibit ikan unggul	3. Penyediaan bibit ikan unggul
		4. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan berkelanjutan	4. Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan dan berkelanjutan
		5. Pengembangan TPI	5. Pembangunan dan peningkatan kapasitas TPI
		6. Meningkatnya kapasitas SDM nelayan	6. Latihan dan sosialisasi terhadap nelayan
	Meningkatnya pola konsumsi ikan masyarakat	1. Meningkatnya produksi olahan ikan	1. Pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha produk olahan ikan
			2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan pangan dan Pola Konsumsi pangan masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	14%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	88,0
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	20.370 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24.243 Ton
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	54,57 Kg/kapita/tahun
No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.143.100.478	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	Rp 351.102.300	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 39.903.850	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 50.000.000	APBD
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.958.656.410	APBD
6	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Rp 1.380.387.153	APBD
Total		Rp 12.923.150.191	

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/Definisi
1	Meningkatnya Ketersediaan cadangan pangan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	Ketersediaan Cadangan Pangan/Kebutuhan cadangan Pangan x100%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor	Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot Bahan Pangan
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Volume Produksi Perikanan Budidaya
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Volume Produksi Perikanan Tangkap
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/kapita /tahun	Angka Konsumsi Ikan (AKI)/Jumlah Penduduk

2.3. Rencana Anggaran

2.3.1. Target Belanja Perangkat Daerah

Struktur anggaran belanja untuk program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang terdiri atas anggaran program dan kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran strategis maupun belanja program dan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis. Jumlah anggaran belanja untuk program prioritas dan untuk program penunjang/pendukung adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Belanja Program Prioritas dan Program Penunjang
Tahun 2021 (*Sebelum Perubahan APBD*)

No	Tahun Anggaran	Rincian Anggaran		Jumlah
		Program Prioritas	Program Penunjang	
1	2	3	4	5
1	2021	Rp. 4.790.049.713,00	Rp. 6.803.546.793,00	Rp. 11.593.596.506,00

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dialokasikan pada 2 (dua) sasaran strategis. Rincian alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis
Tahun 2021 (*Sebelum Perubahan APBD*)

No	Sasaran Strategis	Target Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketersediaan cadangan pangan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Rp. 441.006.150,00
2	Meningkatnya produksi perikanan	Rp. 4.349.043.563,00
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Rp. -
Jumlah		Rp. 4.790.049.713,00

Setelah APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan baik untuk belanja program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis maupun belanja untuk program penunjang. Jumlah anggaran untuk belanja program prioritas dan untuk program penunjang adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Program Prioritas dan Program Penunjang
Setelah APBD Perubahan Tahun 2021

No	Tahun Anggaran	Rincian Anggaran		Jumlah
		Program Prioritas	Program Penunjang	
1	2	3	4	5
1	2021	Rp. 5.780.049.713,00	Rp. 7.143.100.478,00	Rp. 12.923.150.191,00

Alokasi anggaran setelah APBD Perubahan menurut sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran setelah APBD Perubahan menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketersediaan cadangan pangan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Rp. 441.006.150,00
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Rp. 5.339.043.563,00
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Rp. 187.723.380,00 *)
Jumlah		Rp. 5.967.773.093,00

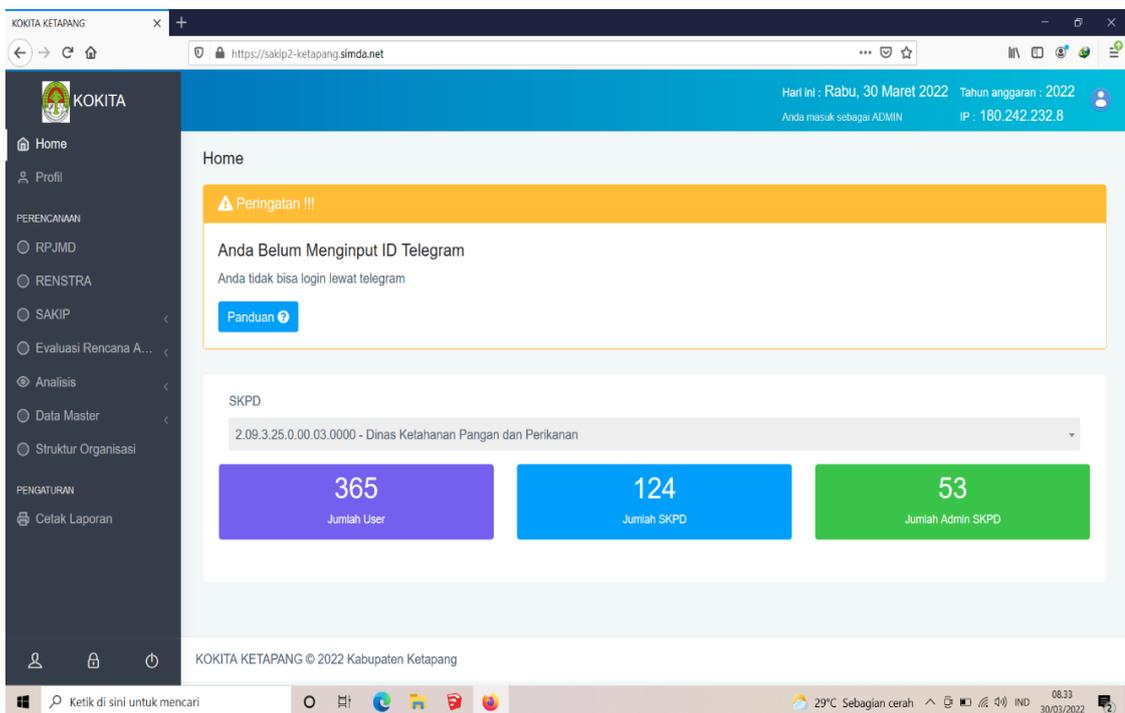
*) Keterangan : Sumber dana untuk sasaran ke-3 berasal dari APBN

2.4. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dalam melakukan pengukuran kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hingga tahun 2021 belum berbasis teknologi informasi. Pengukuran kinerja masih menggunakan format baku secara manual dalam bentuk program Microsoft excel melalui penyusunan rencana aksi kinerja dan evaluasi rencana aksi kinerja serta evaluasi rencana kerja (Evaluasi Renja) setiap triwulan. Kemudian mulai akhir tahun 2021 telah dikembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT melalui

bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dengan nama sistem **"KOKITA"**. Pada sistem KOKITA ini telah dilakukan entry data perjanjian kinerja setiap tahun kemudian dievaluasi setiap triwulan melalui evaluasi rencana aksi. Sistem tersebut adalah sebagaimana tampilan pada gambar berikut.

Gambar 1
Sistem Pemantauan Rencana Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau ketidakberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam laporan kinerja perangkat daerah melalui pengukuran kinerja atas perencanaan dan perjanjian kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021 (Renstra 2016-2021)

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Perhitungan pencapaian sasaran, memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin buruk, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Memperhatikan karakteristik seluruh indikator kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang termasuk dalam kategori yang bersifat positif, yaitu **semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.**

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja yang dijelaskan pada sub bagian ini adalah capaian kinerja utama yang telah diperjanjikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bupati pada awal tahun 2021 setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah untuk **Misi ke-3** (tiga) dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"** untuk sasaran strategisnya yaitu **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi"** dengan indikator kinerja utama adalah **"Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita"**.

Sebelum menjelaskan secara rinci capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021, maka sebagai gambaran pada tabel berikut ini ditampilkan target kinerja jangka menengah untuk masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				Baseline 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	$\frac{(\text{Ketersediaan Cadangan Pangan})}{\text{Kebutuhan Cadangan Pangan}} \times 100$	9,84%	10%	11%	12%	13%	14%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	na	78,8	81,1	83,4	85,7	88,0
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun (Ton)	18.101,72	17.840	18.110	18.654	19.400	20.370
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dalam 1 Tahun (Ton)	20.385	22.498	22.845	23.301	23.767	24.243
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Produksi (Kg)} \times 70\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$	na	43,43	45,65	48,75	52,88	54,57

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya maka pada tabel berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	14	14,32	102,29
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor	88,0	80,70	91,70
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	20.370	21.316,90	104,65
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.243	23.365,54	96,38
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/kapita/tahun	54,57	51,50	94,37

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja utama dari sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ke-1 (satu) yaitu ***Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan*** mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang tercapai hanya satu yaitu ***Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan*** dengan capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar **14,32%** atau **102,29%** dari target yang ditetapkan yaitu **14%**. Capaian indikator kinerja yang ke-2 (dua) yaitu ***Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan***, pada tahun 2021 capaian skornya adalah **80,70** atau **91,70%** dari target **88,0**. Jika dibandingkan dengan pencapaian skor PPH tahun sebelumnya maka pencapaian skor PPH tahun 2021 meningkat.

Capaian kinerja untuk sasaran ke-2 yaitu “**Meningkatnya Produksi Perikanan**” untuk indikator utama yang pertama yaitu ***jumlah produksi***

perikanan budidaya, adalah sebesar **21.316,90** ton atau **104,85%** dari target sebesar **20.370 ton**. Sementara capaian kinerja untuk indikator *jumlah produksi perikanan tangkap* hanya tercapai sebesar **23.365,54** ton atau **96,38%** dari target sebesar **24.243** ton.

Capaian kinerja untuk sasaran ke-3 yaitu “**Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat**” dengan indikator kinerja utama yaitu *Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat*, adalah sebesar **51,50 kg/kapita** atau **94,37%** dari target sebesar **54,57 kg/kapita** per tahun.

Capaian kinerja untuk seluruh sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 dapat disimpulkan belum tercapai dan jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja sasaran strategis selama periode waktu tahun 2017-2021, menunjukkan kecenderungan adanya penurunan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dengan kabupaten tetangga di Provinsi Kalimantan Barat, maka gambaran perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	KETAPANG	KAYONG UTARA	KUBU RAYA	PROVINSI KALBAR
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan (%)	14,32%	na	na	na
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	80,70	83,10	72,2	78,2
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	21.316,90	325,89	4.310,49	83.152,04
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	23.365,54	22.697,76	28.097,07	206.520,04
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	51,50	53,49	49,12	47,14

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat digambarkan bahwa untuk skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dengan nilai 80,7 sudah di atas skor PPH Provinsi Kalimantan Barat yaitu 78,2 dan Kabupaten Kubu Raya yaitu 72,2, namun masih berada di bawah skor PPH Kabupaten Kayong Utara yaitu 83,10.

Kemudian untuk jumlah produksi perikanan budidaya, Kabupaten Ketapang jauh lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan Kabupaten Kubu Raya. dan Kayong Utara. Tetapi untuk capaian jumlah produksi perikanan tangkap posisi Kabupaten Ketapang berada di atas Kabupaten Kayong Utara namun masih di bawah Kabupaten Kubu Raya, sementara untuk jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap untuk Provinsi Kalimantan Barat merupakan akumulasi dari jumlah produksi perikanan budidaya maupun perikanan tangkap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk capaian tingkat konsumsi ikan Kabupaten Ketapang tahun 2021 yaitu sebesar 51,50 kg/kapita, berada di atas angka Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 47,14 kg/kapita dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 49,12 kg/kapita, namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kayong Utara yang sudah mampu mencapai nilai angka konsumsi ikan sebesar 53,49.

Selanjutnya jika dibandingkan antara capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dengan capaian kinerja Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, khususnya untuk indikator kinerja yang dapat diperbandingkan yaitu **Skor PPH** dan **Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat** maka posisi capaian kinerja Kabupaten Ketapang adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.4. Untuk jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tidak dapat dibandingkan karena sifat datanya merupakan data jumlah kumulatif dari penjumlahan angka kabupaten/ kota dan untuk angka nasional merupakan penjumlahan secara kumulatif dari seluruh provinsi termasuk Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	KETAPANG	PROVINSI KALBAR	NASIONAL
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	14,32%	na	59,2
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	80,70	78,2	86,3
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	21.316,90	83.152,04	5.547.368,11
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	23.365,54	206.520,04	7.231.109,57
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/kapita/Tahun)	51,50	47,14	55,37

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah dalam rangka mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-3 (tiga) yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”** melalui penetapan 2 (dua) tujuan yaitu:

1. **Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat; dan**
2. **Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.**

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut diatas telah ditetapkan melalui pencapaian 3 sasaran strategis yaitu:

1. **Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat;**
2. **Meningkatnya produksi perikanan; dan**
3. **Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat.**

Untuk mencapai masing-masing sasaran strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang melaksanakan beberapa program utama tahun 2021 yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.2.1 Sasaran ke-1: Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran ke-1 yaitu meningkatnya ketersediaan cadangan dan pola konsumsi pangan masyarakat dicapai melalui dua indikator kinerja utama yaitu:

1. **Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan; dan**
2. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan.**

3.2.1.1. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang **Pangan**, yang dimaksud dengan **ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional dan/atau daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, **pangan** mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. **Ketersediaan pangan** yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Aspek cadangan pangan menjadi salah satu komponen penting yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena rusaknya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam, bencana sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya. Persentase ketersediaan cadangan pangan mengukur seberapa besar cadangan pangan suatu daerah untuk menutupi kebutuhan pangan daerah tersebut tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka ditetapkan salah satu indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai sasaran strategis "***Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat***" adalah dengan menilai persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan.

Penilaian capaian kinerja untuk mengetahui persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan di Kabupaten Ketapang dihitung dengan menggunakan rumus/formula sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Meta Indikator/ Rumus untuk Menghitung
"**Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan**"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan	$\frac{\text{Jlh Ketersediaan Pangan} - \text{Kebutuhan Pangan}}{\text{Kebutuhan Pangan Tahun Berikutnya}} \times 100$

Kebutuhan pangan tahun 2021 adalah sebesar **58.501** ton dan kebutuhan pangan tahun 2022 diproyeksi naik dari tahun 2021 sehingga menjadi **58.561** ton.

Ketersediaan pangan tahun 2021 diperoleh dengan cara menjumlahkan **Hasil Produksi + Stok (Bulog) + Impor – Ekspor** sama dengan

60.486 ton + 1.404 ton + 5000 ton = 66.890 ton

Maka sisa ketersediaan pangan adalah:

66.890 ton – 58.501 = 8.389 ton

Maka persentase ketersediaan pangan = **8.389/58.561 X 100% = 14,32%**.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, kinerja dari sasaran strategis yang ke-1 yaitu **“Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat”** jika dilihat dari indikator kinerja utama (IKU) yang pertama kemudian dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Utama
“Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan
Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan	9,84%	14%	14,32%	102,29%	14%	102,29%

Selanjutnya jika dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja utama **“Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan”** mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai tahun terakhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang periode 2016-2021, maka capaiannya menunjukkan bersifat fluktuatif atau kondisi naik turun yang tidak tetap.

Capaian kinerja pada tahun 2019 merupakan pencapaian kinerja yang paling rendah yaitu hanya mencapai 11,5% dari target 12% atau 95,83%.

Untuk lebih jelasnya pada tabel dan grafik berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari sasaran strategis **“Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat”** untuk indikator kinerja utama yang pertama yaitu **“Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan”** sebagai berikut:

Tabel. 3.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan”
Tahun 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun														
			2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan dan Pola Konsumsi Pangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	10	10,37	103,70	11	19,17	174,27	12	11,5	95,83	13	22,85	175,77	14	14,32	102,29

Gambar 3.1
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
“Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan”
Tahun 2017-2021



Memperhatikan ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 jika dibandingkan dengan standar Nasional sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010,

masih belum terpenuhi karena diharapkan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Ketapang adalah:

1. Belum terpenuhinya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan pada tahun anggaran 2021 untuk memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah beras sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019. Alokasi anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pengadaan cadangan pangan beras sebesar 6,9 ton.
2. Belum optimalnya produksi hasil pertanian masyarakat khususnya padi akibat adanya gagal panen karena hama dan faktor perubahan cuaca ekstrim sehingga berdampak kepada stok cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat akibatnya tidak dapat dikelola secara maksimal sebagaimana mestinya.
3. Belum optimalnya sarana infrastruktur pendukung distribusi pangan di Kabupaten Ketapang dan ketersediaan toko tani yang belum berkembang

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan ketersediaan Cadangan Pangan adalah:

1. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan atau target yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Ketapang.
2. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian baik melalui intensifikasi atau ekstensifikasi khususnya padi pada wilayah-wilayah yang potensial untuk pertanian, kemudian dilakukan upaya pembatasan alih fungsi lahan untuk perkebunan bagi daerah yang

sangat potensial untuk lahan pertanian termasuk untuk pengembangan sentra produksi pangan/food estate.

3. Peningkatan/perbaikan jalur distribusi oleh sektor terkait dan Pengembangan Toko Tani Indonesia di Kabupaten Ketapang.

3.2.1.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. **Skor PPH** merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. **Skor PPH** maksimal adalah **100**.

Skor PPH menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Jika pada jaman orde baru kita mengenal **4 sehat 5 sempurna** maka sekarang lebih didetailkan menjadi kebutuhan tubuh sesuai dengan bobot masing-masing sumber pangan agar tercipta pola konsumsi yang ideal.

Pola Pangan Harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi **kelompok pangan** yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan. Ada 9 (sembilan) kelompok pangan yang telah ditetapkan bobotnya untuk perhitungan skor PPH yaitu:

- 1) padi-padian;
- 2) umbi-umbian;
- 3) pangan hewani;

- 4) minyak dan lemak;
- 5) buah/biji berminyak;
- 6) kacang-kacangan;
- 7) gula;
- 8) sayur dan buah; dan
- 9) lain-lain.

Skor PPH Konsumsi dihitung dengan rumus/formula sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Meta Indikator/ Formulasi untuk Menentukan
"Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor PPH = Jumlah bobot dari Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing Kelompok Pangan yang sudah ditetapkan sesuai standar.

Berdasarkan rumus tersebut pada tabel 3.8 di atas, maka hasil perhitungan dari persentase angka kecukupan energi untuk masing-masing kelompok pangan dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan di Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra maka hasilnya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama
"Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan"
Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	NA	88,0	80,7	91,70%	88,0	91,70%

Belum tercapainya skor PPH sebesar 88,0 pada tahun 2021, karena konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Ketapang masih kurang beragam, yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.

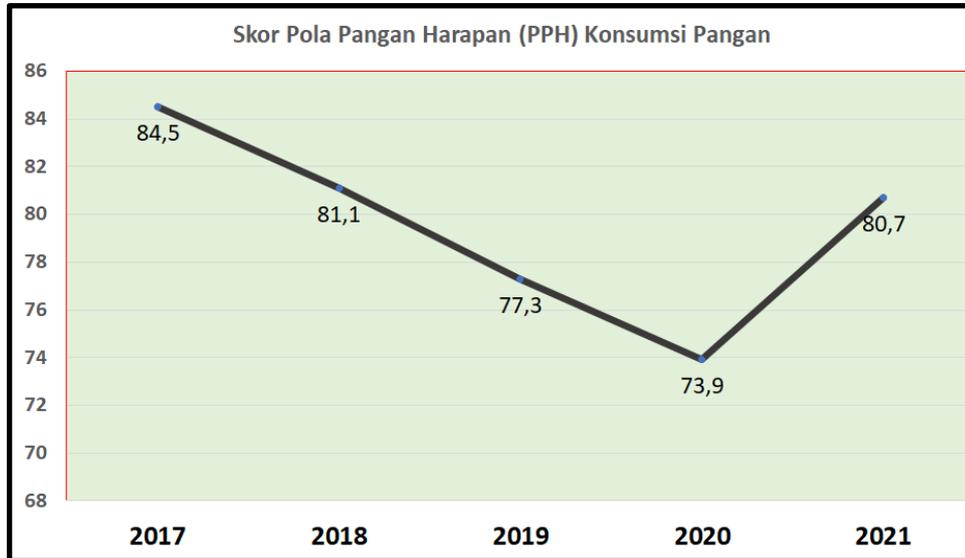
Capaian kinerja sasaran strategis untuk **“Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat”** dengan melihat dari indikator kinerja utama yang kedua yaitu **“Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan”** mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai tahun terakhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang periode 2016-2021, tergambar bahwa capaian kinerjanya menunjukkan penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yang hanya **73,9** dan pada tahun 2021 naik menjadi **80,7**.

Untuk lebih jelasnya pada tabel 3.10 dan gambar 3.2 berikut ini ditampilkan hasil capaian kinerja untuk indikator kinerja utama yang kedua dari sasaran strategis ke-1 **“Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat”** yaitu **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan** mulai dari tahun 2017-2021 dibandingkan dengan target tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 yaitu:

Tabel. 3.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan”
Tahun 2017-2021

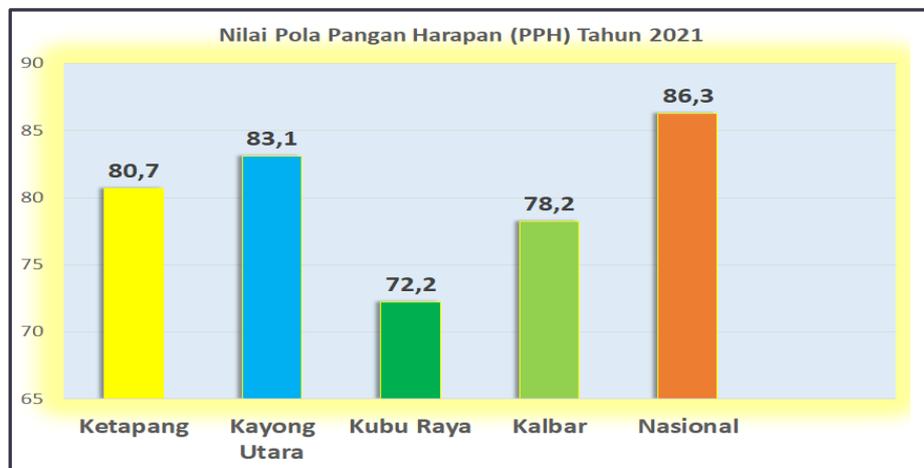
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun														
			2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	78,8	84,5	107,23	81,1	81,1	100,00	83,4	77,3	92,69	85,7	73,9	86,23	88	80,7	91,70

Gambar 3.2
 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
 “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan”
 Tahun 2017-2021



Selanjutnya jika dilihat hasil capaian kinerja untuk **Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi Pangan** Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan Skor PPH Nasional maka posisi Kabupaten Ketapang adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.3. di bawah ini.

Gambar 3.3
 Perbandingan Skor PPH Kabupaten Ketapang
 dengan Kabupaten Tetangga, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
 Tahun 2021



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan adalah:

1. Sulitnya mengubah perilaku masyarakat terkait pola makan yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
2. Masih rendahnya rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang serta masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
3. Masih kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
4. Terbatasnya anggaran untuk pembentukan tim penyuluh ketahanan pangan pada masing-masing desa di Kabupaten Ketapang.
5. Terganggunya pendistribusian hasil pangan akibat masih sulitnya infrastruktur jalan dari daerah yang terisolir sehingga memperlambat proses pendistribusian pangan,
6. Terbatasnya ketersediaan jaringan listrik, sehingga berpengaruh terhadap penyimpanan bahan pangan khususnya bahan pangan yang tidak tahan lama. (harus disimpan di tempat khusus seperti lemari pendingin).

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) adalah:

1. Melaksanakan kampanye Pola Konsumsi untuk Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan ***Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman*** (B2SA) melalui:
 - a. Lomba Cipta Menu B2SA terutama yang berbasis sumber daya pangan lokal,
 - b. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan media sosial.
2. Mengusulkan anggaran untuk pembentukan Tim Penyuluh Ketahanan Pangan melalui APBD Kabupaten Ketapang secara bertahap.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah, terhadap peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur termasuk peningkatan cakupan penyediaan jaringan listrik pada semua wilayah di Kabupaten Ketapang.

3.2.2 Sasaran ke-2 : “Meningkatnya Produksi Perikanan”

Untuk menilai capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Produksi Perikanan**” diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

- 1. Jumlah Produksi perikanan budidaya; dan**
- 2. Jumlah Produksi perikanan tangkap.**

3.2.2.1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Potensi sektor budidaya perikanan di Indonesia termasuk Kabupaten Ketapang dinilai masih sangat besar. Bahkan, potensi produktivitasnya bisa digenjot dengan memanfaatkan teknologi. Sebagai gambaran produksi perikanan budidaya Indonesia saat ini berada di posisi nomor dua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Produksi ikan budidaya Tiongkok sebesar 68,42 juta ton per tahun. Sementara Indonesia di posisi kedua dengan 15,89 juta ton. Padahal panjang garis pantai Tiongkok yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya hanya 14.500 kilometer, sementara Indonesia punya 99.083 kilometer,”

Produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang dari Tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan namun jika dibandingkan dengan potensi yang ada peningkatan tersebut dinilai masih belum maksimal. Potensi sektor budidaya perikanan semestinya dapat terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Produksi Perikanan**” melalui optimalisasi jumlah produksi perikanan budidaya harus terus dilakukan sehingga potensi perikanan budidaya yang besar di Kabupaten Ketapang dapat terus

dimanfaatkan dan pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat khususnya kelompok-kelompok pembudiya ikan karena permintaan pasar dari tahun ke tahun juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan kegiatan perusahaan di sektor perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Ketapang.

Adapun formula untuk menghitung jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Ketapang sebagai indikator kinerja utama yang pertama dari sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan”** adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Meta Indikator/ Formulasi untuk Menentukan
“Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Total Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun dibagi dengan Target Tahunan X 100%

Sesuai dengan formula di atas, maka dengan total jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang tahun 2021 adalah sebesar **21.316,90 ton**. Maka capaian indikator kinerja utama untuk **“Jumlah produksi perikanan budidaya”** tahun 2021 dibandingkan dengan target sebesar **20.370 ton** adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja **“Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”**
Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra

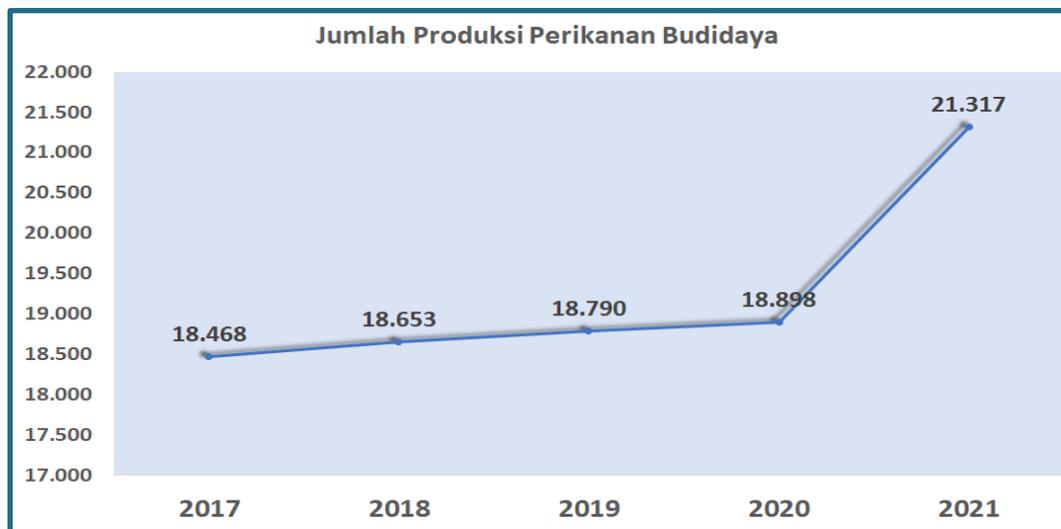
No	Indikator Sasaran	Baseline	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	18.101,72	20.370	21.316,90	104,65%	20.370	104,65%

Capaian kinerja untuk **jumlah produksi perikanan budidaya** tahun 2021 sudah mencapai target, dan jika dilihat kecenderungan setiap tahun jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2017 hingga akhir tahun 2021 menunjukkan peningkatan setiap tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.13 dan gambar 3.4 berikut ini.

Tabel. 3.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Budidaya"
Tahun 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun														
			2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	17.840	18.468	103,52	18.110	18.653	103,00	18.654	18.790	100,73	19.400	18.898	97,41	20.370	21.316,90	104,65

Gambar 3.4
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Budidaya"
Tahun 2017-2021



Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat khususnya dengan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya, maka posisi jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang tahun 2021 jauh lebih besar karena memang potensi dan luas wilayah Kabupaten Ketapang jauh lebih besar di banding dua kabupaten tersebut.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah:

1. Kapasitas SDM pelaku pembudidaya masih perlu ditingkatkan baik melalui pelatihan perikanan budidaya dan kaji banding ke daerah lainnya.
2. Belum optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya.
3. Tingginya harga pakan ikan pabrikan di pasaran mengakibatkan biaya produksi yang semakin besar sehingga berdampak pada harga jual ikan.
4. Belum terbangunnya jaringan pemasaran hasil perikanan budidaya dengan baik.

Alternatif/Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya adalah:

1. Memberikan bantuan sarana perikanan budidaya kepada kelompok dan peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan melalui kaji banding sehingga pengetahuan dan minat masyarakat untuk membudidayakan ikan semakin meningkat dengan demikian produksi perikanan dapat lebih banyak terutama di daerah-daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya.
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya termasuk pemberian bantuan bibit ikan dan pakan ikan sebagai stimulan untuk kelompok.
3. Perbaiki sarana Balai Benih Ikan dan pengembangan kapasitas petugas balai benih ikan sehingga dapat menghasilkan bibit/benih ikan unggul yang sangat efektif mendongkrak jumlah produksi perikanan budidaya.
4. Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.

5. Melaksanakan pelatihan bagi kelompok pembudidaya dengan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk kelompok binaan perusahaan yang berminat pada usaha perikanan budidaya.

3.2.2.2 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) yang tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga ada di danau dan sungai.

Produksi perikanan tangkap di laut Provinsi Kalimantan Barat ke bagian selatan meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Sedangkan ke arah utara meliputi Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Ketapang saat ini juga sangat besar seperti halnya kabupaten lain. Namun potensi sektor perikanan tangkap yang sangat besar tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap tingkat perekonomian di Kabupaten Ketapang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja terhadap sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan”** melalui sektor perikanan tangkap, maka harus dilakukan berbagai upaya seperti **pemberian bantuan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan beserta prasarana penangkapan ikan kepada nelayan**. Hal lain yang harus terus dilakukan adalah peningkatan kapasitas nelayan dan pemberian subsidi seperti BBM Bersubsidi agar kegiatan melaut atau aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan semakin lancar sehingga diharapkan jumlah produksi perikanan akan semakin meningkat.

Adapun formula untuk menghitung jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ketapang sebagai indikator kinerja utama yang kedua dari sasaran strategis “**Meningkatnya Produksi Perikanan**” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Meta Indikator/Formulasi untuk Menentukan
“**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**”

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Total jumlah Produksi Perikanan Tangkap termasuk produksi perikanan dari wilayah perairan umum dalam 1 Tahun dibagi Target Tahunan X 100%

Total produksi perikanan tangkap termasuk hasil produksi perikanan dari wilayah perairan umum tahun 2021 adalah **23.365,54 ton**. Target produksi perikanan tangkap tahun 2021 adalah sebesar **24.243 ton** maka capaian indikator kinerja utama untuk “**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**” adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja “**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**”
Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	20.385	24.243	23.365,54	96,38%	24.243	96,38%

Capaian kinerja untuk **jumlah produksi perikanan tangkap** tahun 2021 **belum mencapai target**, dan jika dilihat dari hasil produksi setiap tahun maka jumlah produksi perikanan tangkap selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahun sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.16 dan gambar 3.5 berikut ini.

Tabel. 3.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Tangkap"
Tahun 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun																
			2017			2018			2019			2020			2021				
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	22.498	22.846	101,55	22.845	25.842	113,12	23.301	19.611	84,16	23.767	22.256,76	93,65	24.243	23.365,54	96,38		

Gambar 3.5
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Tangkap"
Tahun 2017-2021



Potensi produksi perikanan tangkap termasuk dari wilayah perairan umum di Kabupaten Ketapang kemungkinan besar masih jauh lebih besar dari yang dilaporkan selama tahun 2021, karena masih banyak yang belum tercatat terutama di wilayah pulau pulau kecil yang jauh termasuk aktivitas hasil penangkapan ikan dari nelayan kecil.

Sebagai perbandingan dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Kayong Utara sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.3 sebelumnya, jumlah produksi perikananannya hampir sama dengan Kabupaten Ketapang padahal luas wilayah laut serta potensinya jauh lebih besar.

Oleh sebab itu untuk periode berikutnya perlu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan hasil produksi perikanan tangkap.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah:

1. Masih kurangnya alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk nelayan di Kabupaten Ketapang termasuk sarana pendukung untuk kegiatan penangkapan ikan seperti kapal motor dan mesin.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan sehingga para nelayan cenderung beralih profesi menjadi pekerja perkebunan karena penerimaan hasil pekerja sektor perkebunan lebih cepat dibandingkan menjadi nelayan.
3. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penyetruman di wilayah perairan umum.
4. Masih lemahnya kelengkapan administrasi perizinan kapal nelayan sehingga berpengaruh kepada penerimaan subsidi seperti BBM dan hal ini berpengaruh pada aktivitas melaut.
5. Sulitnya nelayan mendapatkan BBM Bersubsidi sehingga kegiatan melaut untuk menangkap ikan juga menjadi kurang.

Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap adalah:

1. Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan melalui DAK dan APBD Kabupaten Ketapang.
2. Memberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan tentang penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap terjaga.
3. Membangun sarana prasarana penangkapan ikan seperti steigher untuk kapal nelayan, dan perbaiki layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

4. Pembenahan administrasi perizinan kapal nelayan agar tidak menimbulkan masalah dalam aktivitas untuk menangkap ikan di laut.
5. Peningkatan mutu pelayanan untuk pemberian Rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan sehingga aktivitas melaut untuk menangkap ikan berjalan dengan lancar.
6. Melaksanakan koordinasi dengan aparat untuk pengawasan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan racun dan penyetruman sesuai kewenangan kabupaten.
7. Memberikan informasi terkait waktu kondisi cuaca ekstrim kepada nelayan agar dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendapatkan informasi *real time* tentang prakiraan cuaca sehingga meningkatkan efisiensi dari aktivitas penangkapan ikan di laut.

3.2.3. Sasaran ke 3 : “Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat”

Angka/tingkat konsumsi ikan merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam daerah yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan ini dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi angka konsumsi ikan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- 2) Tingkat kelancaran suplai ikan, khususnya ke wilayah-wilayah di suatu daerah termasuk jaringan pemasaran; dan
- 3) Kemampuan daya beli masyarakat akan ikan yang harganya selalu menunjukkan kenaikan di pasar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk sasaran strategis **meningkatnya pola konsumsi ikan masyarakat** dinilai dengan menggunakan indikator **angka/tingkat konsumsi ikan masyarakat** dalam satuan kilogram per kapita per tahun. Adapun formula untuk menghitung tingkat konsumsi ikan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Meta Indikator/ Formulasi untuk Menentukan
"Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat"

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	Angka Konsumsi Ikan (AKI) AKI = A + B + C dimana : A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat, atau dengan pendekatan : Jumlah Produksi Perikanan baik Perikanan Budidaya + Perikanan Tangkap x 70% di bagi dengan jumlah Penduduk pada tahun yang bersangkutan.

Sesuai dengan formula/rumus pada tabel di atas maka angka konsumsi ikan masyarakat dilakukan dengan perhitungan yaitu:

$$\text{Angka Konsumsi Ikan (AKI)} = A + B + C$$

dimana : A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT)

B = Konsumsi Luar Rumah Tangga

C = Konsumsi Tidak Tercatat

A. Konsumsi Ikan di Rumah Tangga

- Konsumsi di Rumah tangga dihitung berdasarkan data Susenas (BPS) yang dikonversi ke dalam bentuk setara utuh segar.
- Komponen jenis ikan yang dihitung mencakup 4 kelompok yaitu :
 1. Ikan dan udang segar
 2. Ikan dan udang asin/diawetkan
 3. Terasi/petis (di dalam kelompok bumbu-bumbuan)
 4. Ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, bakar, dll)

Data ke empat kelompok tersebut di atas tidak dapat langsung dijumlahkan karena satuan berbeda (kg, ons, dan potong), dan masih diperlukan faktor konversi dari ikan dalam bentuk asin/awetan dan bumbu-bumbuan ke ikan dalam bentuk segar. Selain itu, diperlukan juga konversi untuk ikan yang berasal dari “kelompok makanan jadi” dari satuan potong ke satuan kilogram.

B. Konsumsi Luar Rumah Tangga, memperhitungkan:

- Perkembangan hotel, restoran dan catering,
- Perkembangan tamu hotel dan restoran,
- Perkembangan penyediaan menu ikan oleh catering,
- Potensi kebutuhan ikan di **Rumah Tangga Khusus** (kelompok ini tidak masuk dalam pencacahan Susenas). Rumah Tangga Khusus yaitu :
 - (1) Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga; dan
 - (2) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

C. Konsumsi Tidak Tercatat

Menggal beberapa produk olahan ikan yang berpotensi tidak tercacah karena tidak ada di dalam Susenas terutama produk olahan ikan berbahan baku surimi seperti nugget ikan, bakso ikan, mpek-mpek, siomay, otak-otak, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, pendekatan yang digunakan untuk menghitung Angka Konsumsi Ikan menggunakan asumsi bahwa jumlah ikan yang dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga, diluar rumah tangga dan konsumsi tidak tercatat adalah sebesar 70% dari jumlah produksi ikan, karena sisanya di estimasi untuk ekspor atau dijual ke daerah lain.

Maka nilai AKI Tahun 2021 diperoleh dari jumlah produksi perikanan Kabupaten Ketapang tahun 2021 sebesar **44.682,44 ton** dengan asumsi ikan yang dikonsumsi sebesar 70% dari jumlah produksi, maka dengan

jumlah penduduk sebanyak 607.350 jiwa maka diperoleh:

$$AKI = \frac{\text{Jumlah Produksi} \times 70\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$AKI = \frac{44.682,44 \text{ Ton} \times 70\%}{607.350} = 0.05150 \text{ ton/kapita/tahun}$$

$$AKI = 0.05150 \times 1000 = \mathbf{51,50 \text{ kg/kapita/tahun}}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian kinerja dari sasaran strategis yang ke-3 yaitu **“Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat”** tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja **“Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat”**
Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	NA	54,57	51,50	94,37	54,57	94,37

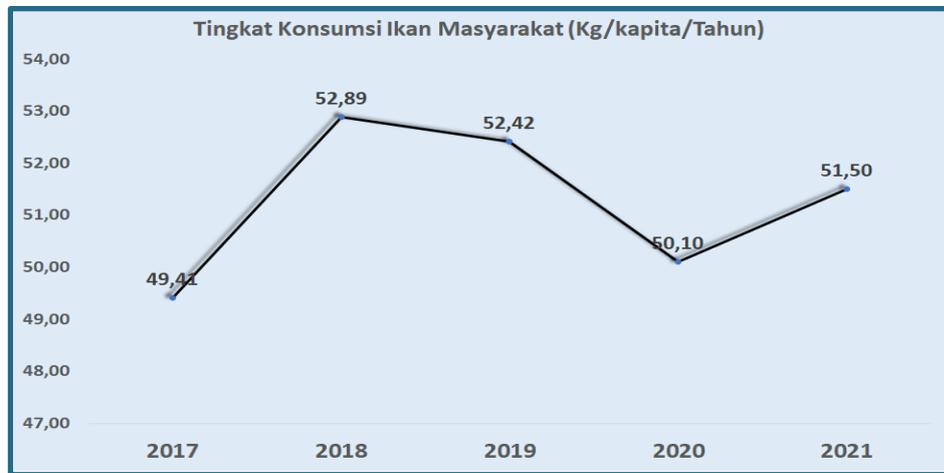
Dengan capaian kinerja senilai **94,37%**, dapat disimpulkan bahwa target tingkat konsumsi ikan masyarakat tahun 2021 **belum tercapai**.

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran strategis untuk **“Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat”** melalui indikator kinerja **Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat**, maka capaian kinerja dari tahun 2018-2020 menunjukkan penurunan dan tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.19 dan gambar 3.6 berikut ini.

Tabel. 3.19
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat”
Tahun 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun														
			2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/kapita/Thn)	43,43	49,41	113,77	45,65	52,89	115,86	48,75	52,42	107,53	52,88	50,1	94,74	54,57	51,5	94,37

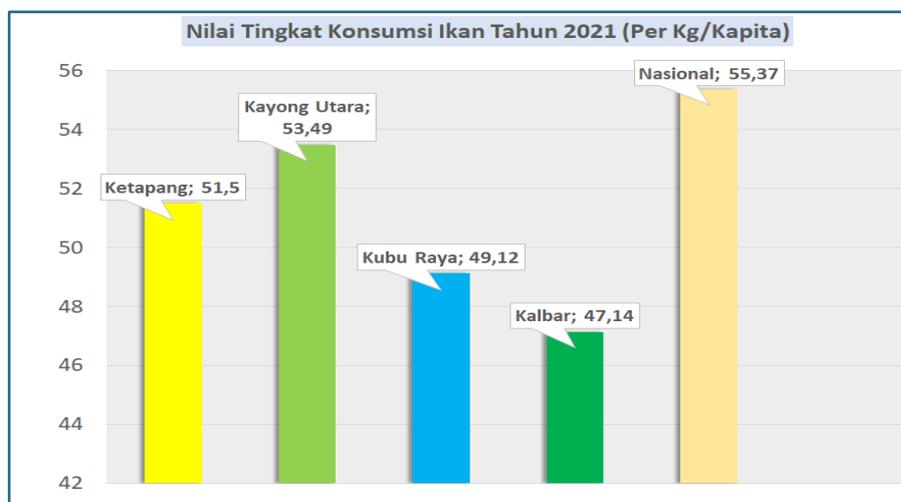
Gambar 3.6
 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
 "Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat"
 Tahun 2017-2021



Selanjutnya jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga di Provinsi Kalimantan Barat dan angka nasional, maka posisi Kabupaten Ketapang masih di atas Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi di bawah capaian angka konsumsi ikan dari Kabupaten Kayong Utara dan Nasional.

Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada gambar 3.7 berikut ini.

Gambar 3.7
 Perbandingan Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Ketapang
 dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan konsumsi Ikan Masyarakat adalah :

- 1) Terbatasnya anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka melaksanakan kampanye Gemarikan dan untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- 2) Rendahnya supply ikan akibat kurang lancarnya distribusi di beberapa wilayah kecamatan;
- 3) Belum berkembangnya teknologi pengolahan dan/atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman untuk memenuhi tuntutan selera semua masyarakat;
- 4) Sarana pemasaran/jejaring pemasaran hasil perikanan masih terbatas; dan
- 5) Menurunnya kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat karena harga ikan di pasaran semakin naik akibat biaya produksi yang semakin mahal termasuk akibat terjadinya pandemi COVID-19.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat adalah:

- 1) Mengusulkan anggaran untuk kegiatan kampanye **Gemarikan (*Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan*)** di setiap wilayah kecamatan;
- 2) Melaksanakan kampanye **Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan** melalui media Sosial dan media elektronik untuk membangun kesadaran individu maupun masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan sebagai pola hidup sehat.
- 3) Memberikan bantuan pengolahan ikan dan melaksanakan Pelatihan Pengolahan Ikan kepada Kelompok-Kelompok Pengolahan Ikan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar terus meningkatkan kualitas jalur distribusi sehingga harga ikan dapat ditekan sesuai kemampuan daya beli masyarakat.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2021 melalui APBD dan APBN sebesar **Rp.5.967.773.093,-** dan terealisasi sebesar **Rp.5.443.039.723,-** atau **91,21%**. Adapun rincian realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan	14%	14,32%	102,29	391.006.150	357.239.376	91,36
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,0	80,70	91,70	50.000.000	49.996.000	99,99
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	20.370 ton	21.316,90	104,65	1.380.387.153	1.166.095.646	84,48
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24.243 ton	23.365,54	96,38	3.958.656.410	3.695.135.971	93,34
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	54,57 Kg/kapita/thn	51,50	94,37	187.723.380	174.572.730	92,99

Ket : Sumber Dana untuk Sasaran ke-3 berasal dari APBN

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Anggaran Persasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan	102,29	91,36	-
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Masyarakat	91,70	99,99	-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	104,65	84,48	-
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	96,38	93,34	-
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	94,37	92,99	-

Untuk menentukan *Tingkat Efisiensi* maka digunakan formula yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ capaian kinerja} - \% \text{ penyerapan anggaran}$$

Berdasarkan tabel 3.16 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi belum dapat ditentukan karena dari **3 (tiga) sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** dengan 5 (lima) indikator kinerja belum ada sasaran yang mencapai kinerja sebesar 100%, karena syarat untuk menetapkan adanya efisiensi anggaran adalah apabila indikator kinerja sasaran strategisnya tercapai sesuai dengan yang direncanakan pada awal perjanjian kinerja.

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan review dan evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang termasuk LKjIP oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dan diperoleh skor nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah **68.30** atau **kategori B** dengan interpretasi **Baik**. Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi APIP (Inspektorat Kabupaten Ketapang) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22

Daftar Rekomendasi APIP atas Evaluasi dan Review LKjIP Tahun sebelumnya serta Tindak Lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memanfaatkan informasi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.	Implementasi pemanfaatan informasi kinerja telah ditindaklanjuti dengan memanfaatkan hasil capaian kinerja dalam LKJIP untuk menguraikan kinerja dan capaian indikator kinerja. Menyusun Matrik Program Kegiatan, pembahasan, perbaikan yang menjadi acuan pelaksanaan program di Dinas Ketahanan dan Perikanan ke depannya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.	Implementasi pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi telah dilakukan melalui pengisian secara online melalui aplikasi KOKITA.
3	Memberikan reward dan punishment terkait hasil kinerja	Rekomendasi ini belum dapat di tindaklanjuti karena harus di konsultasikan terlebih dahulu dengan BKPSDM terkait pedoman dan ketentuan pemberian reward dan punishment dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif atas kinerja pegawai. Setelah itu akan dirapatkan Bersama semua bidang guna memperoleh masukan sehingga Ketika dilaksanakan dapat diterima dengan baik bagi semua pegawai.
4	Mempublikasikan dokumen-dokumen dokumen terkait SAKIP agar dapat di akses secara luas (website)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut dengan mengusulkan pada APBD Perubahan TA. 2022 untuk membuat website DKPP melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan Dinas Kominfo dan ditargetkan akhir tahun anggaran 2022 sudah dapat berfungsi secara optimal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian masing-masing sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian **Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan** tahun 2021 adalah 14,32% dari target 14% atau 102,29%.
- 2) **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan** Kabupaten Ketapang Tahun 2021 mencapai angka 80,70 dari target sebesar 88,0 atau 91,70%.
- 3) Capaian kinerja hasil **Produksi perikanan budidaya** adalah 104,65%, dan hasil **Produksi perikanan tangkap** adalah 96,38% dari target.
- 4) Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Ketapang adalah Tahun 2021 adalah 51,50 kg/kapita/tahun dari target sebesar 54,57 kg/kapita/tahun atau 94,37%.

Alokasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021, adalah sebesar **Rp. 12.923.150.191,-** (sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Honorarium Tenaga Non PNS) dengan realisasi sebesar **Rp. 11.372.511.839,-** atau **88,0%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis adalah:

- 1) Perencanaan yang baik sesuai prioritas dengan mempertimbangkan dampak dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- 2) Tersedianya sarana dan prasarana walaupun masih belum memadai sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati.
- 4) Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas walaupun masih belum memadai sesuai kebutuhan.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan dalam rangka mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Anggaran untuk pengembangan kapasitas aparatur terutama tenaga teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan masih sangat terbatas, termasuk kebutuhan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan prioritas kiranya masih perlu terus ditingkatkan.
2. Pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis pada masa mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan, fokus pada program dan kegiatan prioritas serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta pengendalian internal.
2. Pembenahan internal organisasi dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsinya serta berupaya meningkatkan kapasitas agar dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG SEBELUM APBD PERUBAHAN DAN SETELAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kata Pengantar

Dengan segala Puji dan Syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai alur fikir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang diamanatkan.

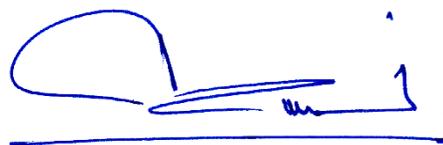
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini berisi Penetapan Sasaran dan Indikator-indikator serta target-target yang hendak dicapai dengan anggaran telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021. Penetapan Indikator, Sasaran dan Target sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkatan capaian sasaran berdasarkan target yang ingin dicapai pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

Semoga sasaran, indikator dan target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Ketapang, 01 Februari 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang



H. AGUS HENDRI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660823 1994003 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta memajukan pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merasa semakin membutuhkan manajemen yang baik dan akuntabel.

Oleh sebab itu bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana terlampir guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang seperti diharapkan, dibutuhkan kinerja yang efektif, efisien, dan transparan serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja ini sangat penting terkait dengan indikator-indikator kinerja, program, sasaran dan target yang hendak dicapai keberhasilannya dalam pembangunan. Maka dari itu Perjanjian Kinerja yang kami sampaikan ini merupakan tolok ukur keberhasilan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jln. Jend. Sudirman No. 15 (0534) 32652 – 32753. Fax (0534) 32753
KETAPANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AGUS HENDRI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos
Jabatan : Bupati Ketapang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam Renstra OPD Tahun 2016 s.d 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 01 Februari 2021

Menyetujui
BUPATI KETAPANG

MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan
Kabupaten Ketapang

H. AGUS HENDRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660823 1994003 1 008

**PENGUKURAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020**

**PROPINSI/ KABUPATEN/ KOTA : KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2020**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi	Ket
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	13%	22,85%	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	85,7	78,8	
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	19.400 Ton	18.898,12	
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	23.768 Ton	22.207,32	
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	52,89 Kg/kapita /tahun	50,10	

Anggaran OPD bersumber dari APBD T.A 2020

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2020 : Rp. 12.436.115.491,30
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 11.893.579.854,00

Anggaran OPD bersumber dari APBN (DAK) T.A 2020

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2020 : Rp. 1.767.111.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 1.582.381.432,00

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	14 %
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	88 Skor
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	20.370 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24.243 Ton
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	54,57 Kg/kapita/tahun

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.803.546.746	APBD
2	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 351.102.300	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 39.903.850	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 50.000.000	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 3.388.656.410	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 960.387.153	APBD

Catatan : Berdasarkan DPA tahun anggaran 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KETAPANG


MARTIN RANTAN, SH.M.Sos

Ketapang, 01 Februari 2021

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang


H. AGUS HENDRI, SE.M.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 19660823 199403 1 008

LAMPIRAN 2

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

**DALAM RANGKA MENDUKUNG PENCAPAIAN
SASARAN STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kata Pengantar

Dengan segala Puji dan Syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Perubahan ini disusun sebagai alur fikir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang diamanatkan.

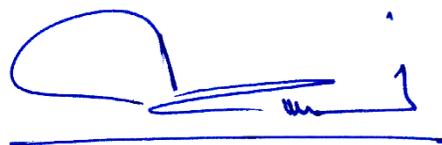
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 ini berisi Penetapan Sasaran dan Indikator-indikator serta target-target yang hendak dicapai dengan anggaran telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021. Penetapan Indikator, Sasaran dan Target sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkatan capaian sasaran berdasarkan target yang ingin dicapai pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

Semoga sasaran, indikator dan target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Ketapang, 01 November 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang



H. AGUS HENDRI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660823 1994003 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta memajukan pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merasa semakin membutuhkan manajemen yang baik dan akuntabel.

Oleh sebab itu bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana terlampir guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang seperti diharapkan, dibutuhkan kinerja yang efektif, efisien, dan transparan serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini sangat penting terkait dengan indikator-indikator kinerja, program, sasaran dan target yang hendak dicapai keberhasilannya dalam pembangunan. Maka dari itu Perjanjian Kinerja Perubahan yang kami sampaikan ini merupakan tolok ukur keberhasilan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jln. Jend. Sudirman No. 15 (0534) 32652 – 32753. Fax (0534) 32753
KETAPANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AGUS HENDRI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos
Jabatan : Bupati Ketapang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam Renstra OPD Tahun 2016 s.d 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 01 November 2021

Menyetujui
BUPATI KETAPANG


MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan
Kabupaten Ketapang


H. AGUS HENDRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660823 1994003 1 008

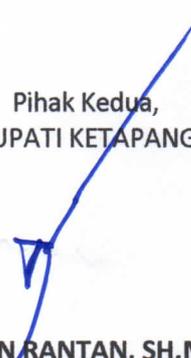
**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	14 %
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	88 Skor
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	20.370 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24.243 Ton
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	54,57 Kg/kapita/tahun

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.143.100.478	APBD
2	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 351.102.300	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 39.903.850	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 50.000.000	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 3.958.656.410	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.380.387.153	APBD

Catatan : Berdasarkan DPPA tahun anggaran 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KETAPANG


MARTIN RANTAN, SH.M.Sos

Ketapang, 01 November 2021

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang


H. AGUS HENDRI, SE.M.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 19660823 199403 1 008